

OMBUDSMAN PAPBAR BAHAS STRATEGI PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT 2022

Senin, 31 Januari 2022 - Nina Loussiana Lalenoh

Manokwari - Memasuki tahun kerja baru, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat mengadakan Rapat Kerja Perwakilan Tahun 2022 yang diselenggarakan di ruang Media Center Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Senin (31/1/2022).

Rapat kerja dipimpin oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Sombuk, dan dihadiri oleh para Asisten, serta PNS dan tenaga pendukung di lingkungan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu dilakukan dalam memasuki tahun kerja baru. Pada sambutannya, Musa Sombuk menyampaikan bahwa rapat ini merupakan gambaran maupun pedoman pekerjaan yang akan dikerjakan ke depan. Hal-hal yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat antara lain, Evaluasi Tahun 2021, Program Prioritas Perwakilan, Anggaran (POK) 2022, dan Struktur Organisasi Keasistenan.

Kepala Perwakilan juga menyampaikan beberapa arahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satunya adalah isu-isu strategis pelayanan publik di Provinsi Papua Barat, dimana kepatuhan terhadap penerapan standar pelayanan publik masih rendah, pemahaman masyarakat tentang Ombudsman dan maladministrasi masih terbatas, pengawas internal instansi pemerintah masih belum efektif (APIP dan Pengawas Fungsional), serta pengawas eksternal belum terkoordinasi baik dan efektif (publik, parlemen, Ombudsman).

Melihat hal tersebut, Kepala Perwakilan menegaskan pendekatan yang dapat digunakan dalam menangani isu-isu pelayanan publik sebagai arah kebijakan perwakilan, yaitu pertama, pendekatan pengawasan/pencegahan maladministrasi, yaitu dengan membangun jaringan pengawasan dengan instansi pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk MoU/PKS, dan Focal Point.

Kedua, pendekatan penyelesaian laporan masyarakat yaitu jaringan pada organisasi kemasyarakatan perlu dimaksimalkan lagi, serta meningkatkan kepedulian publik melalui sosialisasi, edukasi, ekspos laporan masyarakat dan ekspos hasil riset (*Rapid Assesment* dan *Systemic Review*) dan kampanye pada media sosial.

Menutup kegiatan, Kepala Perwakilan menyampaikan juga bahwa apa yang dihasilkan pada rapat bukan hanya menjadi laporan untuk di perwakilan saja, namun akan dibawa juga pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas).